

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap masyarakat di berbagai negara. Tingkat pendidikan menjadi salah satu parameter dari maju atau tidaknya suatu negara yang menunjukkan kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) di Negara tersebut. Tingkat pendidikan suatu Negara juga mengukur pertumbuhan ekonomi dan tingkat kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang berada di Negara maju biasanya memiliki kesadaran tinggi akan pendidikan yang didukung dengan fasilitas dan teknologi yang memadai dari pemerintah. Pemerintah berperan penting sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan yang mempengaruhi jalannya pendidikan di setiap Negara. Kebijakan atau sistem pendidikan yang ada di Negara-negara maju sudah jauh lebih baik dari Negara-negara berkembang di mana ditunjang dengan kemampuan pemerintahnya untuk memfasilitasi segala sarana dan prasarana yang membantu jalannya pendidikan.

Jepang yang merupakan salah satu negara maju di wilayah Asia Timur tentunya memahami betul betapa pentingnya pendidikan bagi warga negaranya. Tingkat pendidikan Negara Jepang sudah tidak dapat diragukan lagi di mana turut memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negaranya serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Berdasarkan data dari *United Nations Development Programme : Human Development Reports* pada 15 November 2013 menunjukkan bahwa Jepang menempati ranking 17 dari 187

negara berdasarkan index pendidikannya dengan nilai 0,890.¹ Banyak observer yang melihat kualitas pendidikan Jepang yaitu kurikulum yang diterapkan di Jepang merupakan peran penting yang dilakukan oleh *Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* (MEXT) dengan pertimbangan dari *Central Council for Education*.² Presiden *Japan Comparative Education Society*, Yutaka Otsuka menyampaikan bahwa pembinaan karakter merupakan salah satu hal yang ditonjolkan dalam sistem pendidikan di Jepang. Selain itu, prioritas utama dalam pendidikan modern di Jepang saat ini adalah tercapainya keharmonisan antara sikap pribadi siswa dan kemampuan mereka untuk bekerjasama dengan orang lain.³

Demi meningkatkan kualitas pendidikan negaranya, pemerintah Jepang mengalokasikan banyak dana per tahun salah satunya berupa tunjangan biaya pendidikan. Pada 31 Maret 2010, pemerintah Jepang menyusun sebuah program yaitu *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund* yang diterapkan pada 1 April 2010. Program ini mengenai biaya sekolah gratis bagi sekolah negeri dan bantuan biaya untuk pembayaran sekolah bagi siswa-siswa di sekolah swasta yang mengajukannya. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi biaya pendidikan bagi orangtua murid dan memperbesar

¹ United Nations Development Programme : Human Development Reports, "Education Index," United Nations Development Program, <http://hdr.undp.org/en/content/education-index> (diakses pada 6 Desember 2014).

² Center on International Education Benchmarking, "Japan Overview," Center on International Education Benchmarking, <http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/> (diakses pada 10 Desember 2014).

³ Margaret Puspitarini, "Belajar dari Sistem Pendidikan Jepang," Okezone, <http://news.okezone.com/read/2012/10/01/373/697406/belajar-dari-sistem-pendidikan-jepang> (diakses pada 20 November 2014).

kesetaraan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas.⁴ Dalam program ini, tidak hanya sekolah Jepang saja yang dapat menerima bantuan dana pendidikan tetapi juga berbagai sekolah asing yang diakui oleh *Japanese Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology* dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh *Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*.⁵

Sebelum adanya program *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund*, sekolah asing yang ada di Jepang telah mendapatkan bantuan dana pendidikan dari pemerintah prefektur, termasuk Sekolah Korea Utara. Sekolah Korea Utara juga turut mengajukan bantuan melalui program *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund* pada tahun 2010, namun dinyatakan ditolak pada tahun 2013. Beberapa pemerintah daerah juga telah menolak subsidi atau memotong subsidi yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah Korea Utara sampai saat ini. Subsidi telah dihentikan di beberapa prefektur seperti Tokyo, Osaka dan Hiroshima pada Oktober 2014. Pemerintah kota seperti Yokohama juga telah mengikuti keputusan pemerintah prefektur dan menahan pemberian subsidi.

Sampai saat ini, terdapat 17 sekolah internasional, 8 sekolah *Brazilian*, dan 2 sekolah *Chinese* yang telah menerima subsidi tersebut. Namun 10 Sekolah

⁴ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, "Free tuition fee at public high schools/High school enrollment support fund sistem," Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, <http://www.mext.go.jp/english/elsec/1303524.htm> (diakses pada 25 Desember 2014).

⁵ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, "Feature2 Making Public High Schools Tuition-Free and High School Enrollment Subsidies," Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/detail/1305888.htm (diakses pada 25 Desember 2014).

Korea Utara dikecualikan dari program bantuan biaya pendidikan tersebut.⁶ Hanya terdapat empat sekolah Korea di Jepang yang berafiliasi dengan Korea Selatan dan mereka diikutsertakan dalam bantuan dana pendidikan oleh pemerintah dalam program tersebut.⁷

Sekolah Korea Utara telah berdiri semenjak tahun 1950-an.⁸ Sekolah Korea Utara dibangun di berbagai tempat di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sekolah ini dibangun oleh warga Korea yang ingin anak mereka untuk belajar bahasa, sejarah, dan budaya Korea sebagai persiapan untuk kembali ke Korea di masa depan.⁹ Hingga saat ini, terdapat 12 Sekolah Menengah Atas Korea Utara di Jepang dengan 1.800 siswa meliputi warga Korea Selatan dan Jepang, namun dua sekolah diantaranya telah ditutup.¹⁰

Pemerintah Jepang seharusnya membantu biaya pendidikan bagi Sekolah Korea Utara sama seperti sekolah Jepang dan sekolah asing lainnya. Tindakan ini tentunya merupakan tindakan yang diskriminatif terutama bagi sekolah Korea Utara yang berada di Jepang. Di mana hak untuk memperoleh pendidikan dengan bebas tanpa ada diskriminasi telah direnggut dengan tindakan ini. Sikap yang

⁶ Hiroshi Tanaka, "Japan's Multicultural Co-existence Seen in the Exclusion of Korean Ethnic High Schools from the School Tuition -free program," SIETAR Japan Kansai Chapter, <http://www.sietar-kansai.com/en/20110711175942.html> (diakses pada 10 Desember 2014).

⁷ Eric Talmadge, "Japan turns up pressure on pro-Pyongyang schools," The Big Story, <http://bigstory.ap.org/article/japan-turns-pressure-pro-pyongyang-schools> (diakses pada 28 Desember 2014).

⁸ Zachary Keck, "UN Raps Japan For Not Funding Pro- Pyongyang Schools," The Diplomat, <http://thediplomat.com/2013/05/un-raps-japan-for-not-funding-pro-pyongyang-schools/> (diakses pada 21 September 2014).

⁹ Fukuoka Yasunori, "Koreans in Japan: Past and Present," Saitama University Web site, <http://www.han.org/a/fukuoka96a.html> (diakses pada 11 September 2014).

¹⁰ Editorial, "Treat all students equally," The Japan Times, <http://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/03/01/editorials/treat-all-students-equally/#.VMhVDGiUfpD> (diakses pada 25 Desember 2014).

ditunjukkan oleh pemerintah Jepang ini menuai kritik oleh *Committee on the Elimination of Racial Discrimination of the United Nations* juga *Amnesty International Japan*. Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

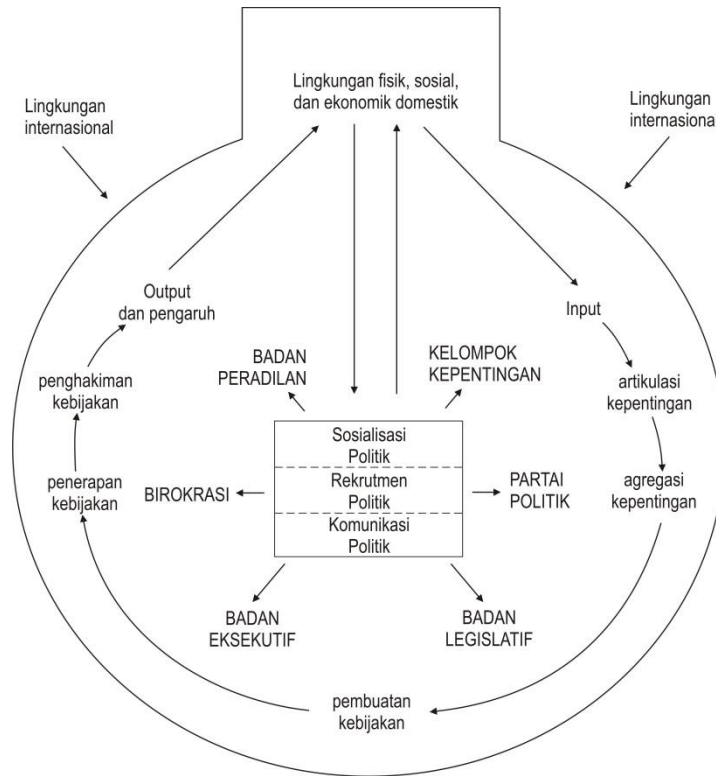
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu : Mengapa Pemerintah Jepang Tidak Memberikan Bantuan Dana Pendidikan Berdasarkan Program *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund* Kepada Sekolah Korea Utara di Jepang?

C. Kerangka Berpikir

1. Sistem Politik

Untuk membantu menganalisa permasalahan yang termuat di dalam skripsi ini, penulis menggunakan konsep Sistem Politik Model Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond.¹¹

¹¹ Gabriel A. Almond, "Studi Perbandingan Sistem Politik," dalam Perbandingan Sistem Politik, ed. Mohtar Mas'oe'd dan Colin McAndrews (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1997), 30.



Bagan 1.1 Sistem Politik Model Struktural Fungsional – Gabriel Almond

Sistem merupakan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga Sistem Politik merupakan seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. Sistem politik memiliki lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.¹²

Dalam model struktural fungsional milik Gabriel Almond di atas, dapat dilihat bahwa terdapat berbagai struktur politik yang saling memiliki fungsi-

¹² Ibid, hal. 24.

fungsinya masing-masing. Terdapat tiga fungsi politik yang tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik, yaitu¹³ :

- a. Fungsi sosialisasi politik yang mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umumnya atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, dan judicial tertentu. Fungsi ini melibatkan keluarga, sekolah, media komunikasi, gereja, pekerjaan dan berbagai struktur politik.
- b. Fungsi rekrutmen politik yang menyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.
- c. Fungsi komunikasi politik yang menyebarkan informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Sedangkan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan dalam setiap sistem politik meliputi¹⁴ :

- a. Input yaitu adanya tuntutan dari luar.
- b. Artikulasi kepentingan yakni individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat menyampaikan apa yang menjadi kepentingan mereka yang kemudian ingin mereka dapatkan dari politik.

¹³ Ibid, hal. 29-30.

¹⁴ Ibid, hal. 30.

- c. Agregasi kepentingan adalah kepentingan-kepentingan dan tuntutan yang digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan.
- d. Pembuatan kebijaksanaan yang di mana kebijaksanaan dipertimbangkan dan ditentukan pilihannya dari alternatif-alternatif yang tersedia. Proses ini berlangsung di parlemen dengan adanya diskusi-diskusi dari masing-masing fraksi atau parpol. Perbedaan pendapat didasari dari kepentingan serta ideologi masing-masing fraksi.
- e. Penerapan kebijaksanaan (output) yakni terbentuknya suatu kebijaksanaan yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial dan kebudayaan masyarakat domestik yang selanjutnya mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan pada sistem politik.
- f. Penghakiman kebijaksanaan yaitu bila ada keputusan yang ditentang atau diselewengkan, maka harus ada proses penghakiman.

Setiap sistem politik memiliki cara tertentu dalam merumuskan dan menanggapi tuntutan. Kelompok kepentingan dibentuk untuk memperkuat dan mengefektifkan tuntutan-tuntutan individual yang ada dalam kehidupan politik. Menurut Almond, kelompok kepentingan adalah sekelompok individu yang tergabung atas kesadaran atau keuntungan serta kepentingan yang sama.¹⁵ Kelompok kepentingan terbagi menjadi empat berdasarkan perbedaan struktur, gaya, sumber pembiayaan dan basis dukungannya, yaitu¹⁶ :

¹⁵ Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., *Comparative Politics : System, Process, and Policy* (Canada : Little, Brown and Company, 1978), 170.

¹⁶ Gabriel A. Almond, "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik," dalam *Perbandingan Sistem Politik*, ed. Mohtar Mas'ood dan Colin McAndrews (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1997), 54-56.

- a. Kelompok anomik yaitu kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, serta pada umumnya melakukan tindakan non-konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan, tindakan kekerasan politik dan sebagainya.
- b. Kelompok non-assosiasional yaitu kelompok yang kurang terorganisir rapi dan kegiatannya hanya kadang kala saja, keanggotaannya diperoleh atas dasar kesamaan keluarga dan keturunan, status, agama, kelas atau etnis yang menyatakan kepentingannya melalui individu-individu, pemuka-pemuka agama, dan sebagainya.
- c. Kelompok Institusional yaitu kelompok kepentingan yang bersifat formal dan terorganisir dengan rapi, terdiri dari orang-orang profesional di bidangnya, serta memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Kelompok ini berpengaruh biasanya akibat dari basis organisasinya yang kuat.
- d. Kelompok assosiasional meliputi serikat buruh, kamar dagang , perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama, dan sebagainya yang menyatakan kepentingannya menggunakan staf ahli dengan proses yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan.

Kelompok kepentingan harus dapat mempengaruhi sktruktur pembuatan keputusan politik agar tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai dapat

terealisasikan. Mereka memerlukan adanya saluran-saluran untuk menyampaikan kepentingan mereka. Menurut Almond, ada dua tipe saluran yang dapat digunakan yaitu¹⁷ :

1. *Constitutional Access Channel*

- a. Melalui hubungan pribadi – misalnya keluarga, sekolah, hubungan-hubungan kedaerahan atau yang lainnya.
- b. Melalui perwakilan langsung di badan legislatif dan birokrasi.
- c. Melalui saluran formal dan institusional lain yaitu media masa, partai politik serta badan legislatif, kabinet, dan birokrasi.
- d. Melalui demonstrasi.

2. *Coercive Channel (Saluran yang memaksa)*

Berbeda dengan saluran melalui demonstrasi, saluran yang memaksa ini lebih dicirikan dengan penggunaan tindakan kekerasan berupa pemogokan dan pengerusakan, kerusuhan dan taktik terror, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok asosional dan institusional yang terorganisir.

Jika kita menerapkan konsep yang dikemukakan oleh Almond untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, maka kita dapat melihat dari tuntutan kelompok kepentingan yang bertugas melakukan artikulasi kepentingan dalam sistem politik. Kebijakan atau output dalam masalah ini adalah pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada Sekolah Korea Utara berdasarkan program *Free Tuition Fee at Public High Schools and*

¹⁷ Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., *Comparative Politics : System, Process, and Policy*, Op.Cit., hal. 178-189.

High School Enrollment Support Fund terutama program *High School Enrollment Support Fund* (karena *Free Tuition Fee at Public High Schools* diperuntukan bagi sekolah negeri Jepang). Kebijakan ini muncul sebagai akibat dari adanya tuntutan yang dilakukan oleh kelompok *Zaitokukai* yakni untuk tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada sekolah Korea Utara di Jepang karena sekolah Korea Utara dianggap tidak memenuhi syarat dan diindikasikan mengajarkan nilai-nilai komunisme.

Setiap siswa berhak mendapat bantuan dana pendidikan jika siswa tersebut bersekolah baik di sekolah negeri atau swasta (yang diakui) dengan mengisi formulir berserta lampiran bukti pendapatan orangtua yang dikumpulkan melalui sekolah. Untuk dapat diakui, sekolah harus menggunakan *textbook* yang diterima oleh *Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* dan harus mengikuti pedoman mengajar yang telah disiapkan oleh *Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* serta mengajarkan kepada siswa berdasarkan pedoman tersebut. Namun pada kenyataannya, sekolah Korea Utara membentuk sendiri kurikulum serta *textbook* yang digunakan di sekolah.¹⁸ Sekolah Korea Utara di Jepang juga sangat loyal terhadap rezim komunis yang tercermin pada mata pelajaran yang diajarkan dan juga di ruangan kelas di mana selalu ada foto Kim Il-sung dan Kim Jong-il di atas papan tulis, persis seperti sekolah-sekolah di Korea Utara.¹⁹

¹⁸ Mutsumi Matsumoto, "Education Policy for Korean minority in Japan," welfareasia web site, http://welfareasia.org/2ndconference/paper/Mutsumi%2520Matsumoto_Paper%282ndEASP%29.doc+%&cd=1&hl=id&ct=clnk (diakses pada 18 September 2014).

¹⁹ Julian Ryall, "Jepang Pangkas Dana Sekolah Pro – Pyongyang," Deutsche Welle Web site, <http://www.dw.de/jepang-pangkas-dana-sekolah-pro-pyongyang/a-16630826> (diakses pada 4 September 2014).

Kenyataan yang terdapat di Sekolah Korea Utara yang di jelaskan di atas membuat Kelompok *Zaitokukai* menuntut agar pemerintah tidak memberikan mereka bantuan dana. Pada dasarnya, Kelompok *Zaitokukai* merupakan kelompok ekstrimis sayap kanan anti-Korea yang menolak keberadaan etnis Korea di Jepang. Kelompok ini merupakan kelompok anomik yaitu kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, serta pada umumnya melakukan tindakan non-konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan, tindakan kekerasan politik dan sebagainya.

Zaitokukai berperan dalam melakukan artikulasi kepentingan di dalam sistem politik di mana mereka menyampaikan kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan mereka kepada pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan atau kebijakan. Saluran yang dipergunakan oleh kelompok ini yaitu melalui demonstrasi berupa *Hate Speech* yang kerap kali dilakukan di depan sekolah-sekolah Korea Utara, melalui hubungan pribadi yang di mana beberapa pejabat kabinet saat ini diindikasikan punya hubungan yang erat dengan ketua kelompok ini, serta melalui saluran formal dan institusional lain yaitu media masa di mana yang digunakan adalah media internet dengan menyebarkan video-video *hate speech* yang ditujukan kepada sekolah Korea Utara di Jepang.

2. *Hard Power*

Selain menggunakan konsep sistem politik, penulis juga menggunakan konsep *hard power* yang dikemukakan oleh Joseph S. Nye, Jr untuk membantu menganalisa permasalahan dalam skripsi ini. Menurut Joseph, *power*

(kekuatan/kekuasaan) adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Sumber dari *power* adalah populasi, wilayah, sumber daya alam, kekuatan ekonomi, kekuatan militer dan stabilitas politik. Namun seiring dengan perubahan zaman, sumber kekuatan berupa teknologi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih penting dibandingkan dengan geografi, populasi dan bahan mentah yang dimiliki oleh suatu negara.²⁰

Terdapat tiga cara untuk mempengaruhi pihak lain tersebut, yaitu dengan “*Threats of Coercion*” (*sticks*), “*Inducements and payments*” (*carrots*) dan “*Attraction*”.²¹ Jika *soft power* menggunakan “*attraction*” melalui budaya ataupun ideologi yang dimiliki sehingga pihak lain mengikutinya, maka *hard power* menggunakan strategi ancaman atau paksaan.²² Dengan kata lain, *Hard Power* adalah kemampuan untuk menggunakan “*sticks*” dan “*carrots*” baik melalui kekuatan militer atau ekonomi untuk mempengaruhi pihak lain. Contoh dari penggunaan “*sticks*” adalah suatu negara mengancam dengan kekuatan militer kepada pihak lain atau ketika suatu negara melakukan embargo ekonomi terhadap negara lain. Sedangkan contoh penggunaan “*carrots*” adalah ketika suatu pihak menjanjikan akan memberikan perlindungan militer atau menjanjikan akan mengurangi hambatan baik tarif maupun non-tarif dalam konteks perdagangan.

Meskipun penggunaan *hard power* tidak lagi menjadi prioritas dan telah digantikan oleh *soft power*, namun penggunaannya masih dapat menjadi alternatif bagi suatu negara untuk memaksa pihak lain mengikuti apa yang diinginkan. Pada

²⁰ Joseph S. Nye, Jr., “Soft Power,” *Foreign Policy* No. 80, Twentieth Anniversary (Autumn, 1990): 154.

²¹ Joseph S. Nye, Jr., “Public Diplomacy and Soft Power,” *Annals of the American Academy of Political and Social Science* Vol. 616, *Public Diplomacy in a Changing World* (Mar., 2008): 94-95.

²² Joseph S. Nye, Jr., *Soft Power*, Op.Cit, hal. 167.

dasarnya baik *hard* ataupun *soft power* bertujuan untuk meraih apa yang menjadi kepentingan dari pihak yang menggunakannya. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya baik dalam pemerintahan maupun juga yang berlangsung dalam masyarakat luas yang meliputi individu maupun kelompok.

Jika kita menerapkan konsep *hard power* dalam kasus ini, maka kita dapat melihat bahwa pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada sekolah Korea Utara di Jepang karena Korea Utara belum menyelesaikan masalah penculikan warga Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an serta masih melakukan uji coba nuklir. Pada tahun 2002 pemerintah Korea Utara pada waktu itu, Kim Jong Il, membuat pernyataan bahwa agen mereka telah menculik warga Jepang untuk dididik menjadi mata-mata pada tahun 1970-1980an. Hal tersebut meresahkan masyarakat Jepang dan keluarga yang telah kehilangan anggota keluarganya yang menjadi korban dalam penculikan itu. Pada tahun 2012, Shinzo Abe meminta pihak Korea Utara untuk melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengusut kasus tersebut namun pihak Korea Utara menyatakan jika kasus tersebut telah ditutup.

Selain masalah penculikan tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa Korea Utara masih mengembangkan senjata pemusnah masal yaitu senjata nuklir. Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara meresahkan masyarakat internasional. Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB menyebut uji coba nuklir Korea Utara sebagai pelanggaran berat karena mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik yang mengancam perdamaian internasional. Jepang

sebagai negara yang berada dekat dengan Korea Utara merasa terancam dengan adanya nuklir tersebut. Sampai saat ini pun Jepang dengan Korea Utara belum menjalin hubungan diplomatik.

Dalam kasus ini, pemerintah Jepang menggunakan penghentian pemberian subsidi kepada sekolah Korea Utara di Jepang sebagai *hard power* yang dilakukan untuk mengancam dan memaksa Korea Utara agar segera menyelesaikan kedua masalah tersebut. Masyarakat Jepang merasa resah jika akan terjadi lagi penculikan yang membuat mereka memandang etnis Korea di Jepang sebagai ancaman. Selain itu, Jepang yang secara geografis berada dekat dengan Korea Utara juga terancam keamanannya. Kedua hal ini lah yang menjadi kepentingan yang ingin dicapai oleh pemerintah Jepang agar masyarakat tidak lagi merasa resah dan menjamin keamanan Jepang.

D. Hipotesis

Pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada Sekolah Korea Utara berdasarkan program *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund* yang diterapkan pada tahun 2010 karena :

1. Adanya tuntutan dari Kelompok *Zaitoku-kai* untuk tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada Sekolah Korea Utara di Jepang.
2. Sebagai bentuk *hard power* pemerintah Jepang untuk mendesak penyelesaian kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an serta penghentian uji coba nuklir Korea Utara.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan mengenai pengaruh dari Kelompok *Zaitoku-kai* yang menyebabkan pemerintah tidak memberikan bantuan dana pendidikan bagi Sekolah Korea Utara.
2. Untuk menjelaskan mengenai penggunaan *hard power* oleh pemerintah Jepang dalam mendesak penyelesaian penculikan warga Jepang dan penghentian nuklir oleh Korea Utara.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam skripsi ini adalah di mana topik yang dipilih merupakan tentang program bantuan dana pendidikan yakni *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund*. Selanjutnya diterapkan pembatasan objek yang diteliti yaitu Sekolah Korea Utara di Jepang. Alasan dari jangkauan penelitian ini adalah Sekolah Korea Utara di Jepang merupakan sekolah asing yang tidak diikutsertakan dalam program bantuan biaya pendidikan yang diterapkan pada tahun 2010. Pembatasan rentang waktu dalam skripsi ini adalah dari semenjak diterapkannya program tersebut yaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2015.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta

pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²³ Penggunaan pendekatan kualitatif dalam skripsi ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah yang ada serta membuktikan hipotesis yang telah dibuat.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari artikel-artikel dalam surat kabar ataupun majalah, buku, artikel-artikel dari jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan-laporan, arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi, analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survei terdahulu, catatan-catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi serta catatan-catatan perpustakaan.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini akan dibagi menjadi lima Bab. Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teoritik, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Kerangka Penulisan. Pada Bab II akan diuraikan mengenai Isu Pendidikan di Jepang dengan menjelaskan mengenai Sistem Pendidikan di Jepang dan mengenai Program “Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund”. Dilanjutkan dengan uraian di Bab III yang akan menjelaskan mengenai Sekolah Korea Utara di Jepang

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 5.

²⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : Unpar Press, 2006), 267-268.

dengan gambaran Etnis Korea di Jepang, Sekolah Asing di Jepang, dan Sekolah Korea Utara di Jepang. Pada Bab IV akan dijelaskan mengenai alasan mengapa pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan bagi Sekolah Korea Utara yaitu Adanya tuntutan dari Kelompok *Zaitoku-kai* dan Sebagai Bentuk *hard power* Jepang dalam mendesak penyelesaian masalah penculikan warga Jepang dan penghentian uji coba nuklir Korea Utara. Pada Bab ini, sekaligus akan menjawab rumusan masalah dengan menerapkan kerangka berpikir yang ada serta membuktikan hipotesa, dilanjutkan dengan Bab V yang merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi ini.